

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan Revolusi Industri 4.0 telah menimbulkan perubahan signifikan di berbagai sektor, termasuk pada sistem pembayaran yang kini semakin terarah pada digitalisasi. Untuk mendukung transformasi tersebut, Bank Indonesia menetapkan standar nasional kode QR bagi transaksi pembayaran digital melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/18/PBI/2019 yang selanjutnya dikenal dengan nama QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*). Peluncuran QRIS pada 17 Agustus 2019 menjadi langkah strategis Bank Indonesia dalam mengintegrasikan berbagai platform pembayaran digital ke dalam satu standar kode QR. Melalui sistem ini, satu kode QR dapat digunakan secara luas oleh seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (Bank Indonesia 2019).

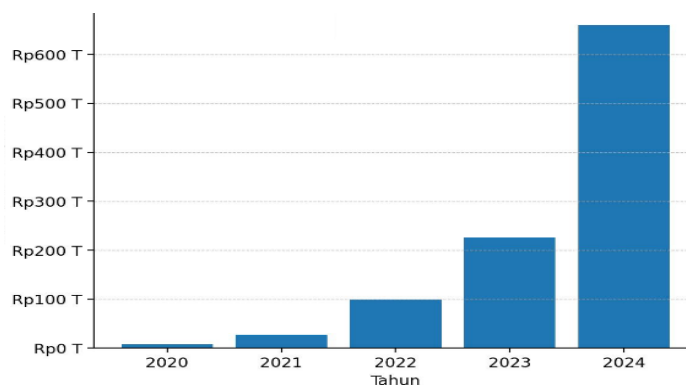
Penerapan QRIS bagi pelaku UMKM memberikan berbagai manfaat dalam kegiatan usaha, terutama dalam mempermudah transaksi, mempercepat proses pembayaran, serta membuka peluang untuk meningkatkan pendapatan penjualan. Berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah pengguna QRIS pada tahun 2023 telah mencapai 30 juta merchant, dengan pertumbuhan yang terus meningkat di kalangan UMKM di berbagai wilayah (Bank Indonesia 2023). Meskipun demikian, pemanfaatan QRIS pada UMKM sektor kuliner di Kabupaten Bojonegoro masih belum berlangsung secara merata. Sebagian pelaku usaha masih menunjukkan keraguan dalam menggunakannya, yang umumnya disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan tentang teknologi serta dukungan infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai. Maka dari itu UMKM pada sektor kuliner perlu adanya QRIS untuk mendukung kemudahan dalam transaksi, guna mendukung perekonomian yang signifikan terhadap ekonomi nasional.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan yang sangat strategis dalam mendukung perekonomian Indonesia. Sektor ini menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional karena memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2023 sektor UMKM memberikan kontribusi sekitar 60,3% terhadap keseluruhan PDB Indonesia dan mampu menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional (BPS, 2024). Di antara berbagai bidang usaha UMKM, sektor kuliner termasuk yang mengalami perkembangan cukup pesat. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa makanan merupakan kebutuhan pokok manusia, sekaligus membuka peluang usaha yang potensial dan menjanjikan bagi masyarakat luas. Tak hanya itu fenomena pertumbuhan UMKM sektor kuliner tersebut tidak hanya terjadi secara nasional, tetapi juga dapat diamati secara nyata di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya adalah di Kabupaten Bojonegoro.

Perkembangan UMKM sektor kuliner yang pesat secara nasional tersebut juga tercermin di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil minyak bumi di Jawa Timur yang menunjukkan perkembangan ekonomi cukup dinamis (Sholikin, 2018). Kondisi tersebut turut mendorong pertumbuhan berbagai sektor usaha, termasuk bidang kuliner yang mengalami perkembangan cukup pesat. Kemajuan ini didukung oleh meningkatnya arus wisatawan serta tingginya mobilitas masyarakat dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, pelaku UMKM di sektor kuliner masih dihadapkan pada sejumlah kendala. Tantangan yang paling menonjol berkaitan dengan pengelolaan keuangan usaha yang belum optimal serta masih terbatasnya pemanfaatan teknologi pembayaran digital dalam kegiatan transaksi.

Perkembangan penggunaan QRIS secara nasional menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.1

Gambar 1. 1 Transaksi QRIS 2020-2024 (Triliun Rupiah)



Sumber: Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa nilai transaksi QRIS selama periode 2020-2024 mengalami pertumbuhan yang konsisten dan cenderung akseleratif. Pada fase awal, yaitu tahun 2020 dan 2021, peningkatan masih tergolong moderat. Namun, mulai tahun 2022 terjadi lonjakan yang lebih besar, yang kemudian berlanjut pada 2023 dan mencapai puncaknya pada 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa QRIS telah berkembang menjadi salah satu sarana pembayaran digital yang semakin dominan dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, grafik ini memperlihatkan bahwa adopsi QRIS tidak hanya meningkat secara nominal, tetapi juga menandakan semakin kuatnya transformasi digital dalam sistem pembayaran di Indonesia.

Di samping penerapan teknologi pembayaran digital, tingkat literasi keuangan juga menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan UMKM dalam menjalankan usahanya. Literasi keuangan berkaitan dengan pemahaman, keterampilan, serta keyakinan yang membentuk sikap dan perilaku seseorang dalam mengambil keputusan keuangan secara lebih tepat dan berkualitas (OJK, 2023). Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi keuangan

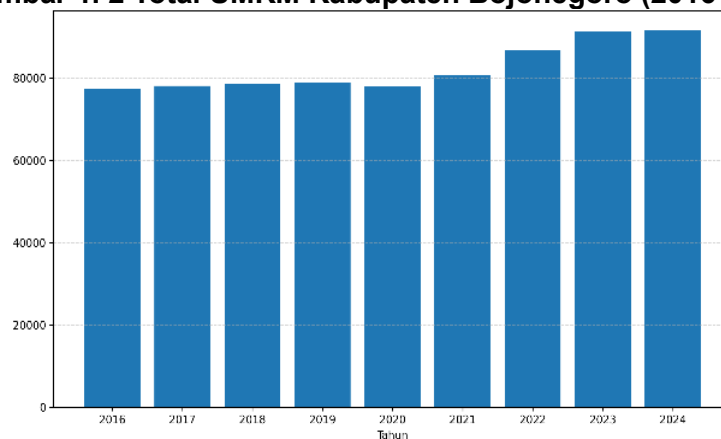
masyarakat Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebesar 49,68%, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 yang berada pada angka 38,03%. Walaupun menunjukkan perkembangan positif, capaian tersebut masih mengindikasikan bahwa hampir setengah dari masyarakat Indonesia belum memiliki tingkat literasi keuangan yang memadai.

Inklusi keuangan dapat dipahami sebagai keadaan ketika masyarakat memiliki kesempatan dan akses untuk menggunakan berbagai layanan serta produk keuangan formal yang berkualitas (World Bank, n.d.). Berdasarkan data OJK, tingkat inklusi keuangan di Indonesia pada tahun 2022 telah mencapai 85,10%. Bagi pelaku UMKM, kemudahan dalam mengakses layanan keuangan formal, seperti perbankan, pembiayaan, maupun asuransi, berperan penting dalam memperkuat kapasitas usaha. Akses tersebut pada akhirnya dapat mendorong perkembangan usaha dan meningkatkan omzet yang diperoleh.

Kajian mengenai pengaruh penggunaan QRIS terhadap omzet UMKM masih relatif baru, mengingat kebijakan ini mulai diberlakukan pada tahun 2019. Sejumlah penelitian menunjukkan temuan yang berbeda-beda. (Maulana & Subroto, 2025) mengungkapkan bahwa penggunaan QRIS memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM. Di sisi lain, beberapa studi lain menjelaskan bahwa persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan QRIS menjadi faktor kunci dalam mendorong intensi adopsi oleh UMKM (Sholihah & Nurhapsari, 2023).

Setelah melihat perkembangan QRIS secara nasional, konteks wilayah Kabupaten Bojonegoro penelitian perlu menjelaskan dan diperkuat. Gambaran perkembangan UMKM di Kabupaten Bojonegoro disajikan pada Gambar 1.2

Gambar 1. 2 Total UMKM Kabupaten Bojonegoro (2016-2024)



Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

Berdasarkan grafik Total UMKM Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016-2024, terlihat bahwa jumlah UMKM cenderung mengalami tren peningkatan selama periode pengamatan. Pada tahun 2016 hingga 2019, pertumbuhan jumlah UMKM berlangsung relatif stabil dengan kenaikan yang tidak terlalu besar. Namun, pada tahun 2020 tampak adanya sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini dapat diartikan sebagai indikasi adanya tekanan terhadap aktivitas usaha masyarakat pada periode tersebut. Setelah itu, jumlah UMKM kembali meningkat pada tahun 2021 dan mengalami pertumbuhan yang lebih jelas pada tahun 2022 hingga 2024.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara (gap) besarnya potensi penggunaan QRIS, literasi keuangan, dan inklusi keuangan dalam mendorong peningkatan omzet UMKM sektor kuliner dengan kenyataan di lapangan yang masih memperlihatkan belum meratanya penerapan di Kabupaten Bojonegoro. Atas dasar kondisi tersebut, peneliti merasa perlu untuk melakukan kajian yang lebih mendalam melalui penelitian yang berjudul “Pengaruh Penggunaan QRIS, Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap Omzet UMKM Sektor Kuliner di Kabupaten Bojonegoro”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penggunaan QRIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap omzet UMKM sektor kuliner di Kabupaten Bojonegoro?
2. Apakah literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap omzet UMKM sektor kuliner di Kabupaten Bojonegoro?
3. Apakah inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap omzet UMKM sektor kuliner di Kabupaten Bojonegoro?
4. Apakah penggunaan QRIS, literasi keuangan, dan inklusi keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap omzet UMKM sektor kuliner di Kabupaten Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dampak penggunaan QRIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap omzet UMKM sektor kuliner di Kabupaten Bojonegoro.
2. Menganalisis literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap omzet UMKM sektor kuliner di Kabupaten Bojonegoro.
3. Menganalisis inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap omzet UMKM sektor kuliner di Kabupaten Bojonegoro.
4. Menganalisis penggunaan QRIS, literasi keuangan, dan inklusi keuangan secara simultan terhadap omzet UMKM sektor kuliner di Kabupaten Bojonegoro.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi keuangan digital, literasi keuangan, dan inklusi keuangan dalam konteks UMKM. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik serupa, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan lembaga pendidikan Universitas Bojonegoro.

2. Manfaat Praktis

Bagi pelaku UMKM, penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai pentingnya adopsi QRIS, peningkatan literasi keuangan, dan akses terhadap layanan keuangan formal. Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pemberdayaan UMKM. Bagi Bank Indonesia dan OJK, penelitian ini dapat memberikan gambaran efektivitas program QRIS dan literasi keuangan di daerah.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi agar pembahasan lebih terarah. Batasan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian dibatasi pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini dibatasi secara wilayah pada 5 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, yaitu Kecamatan Bojonegoro, Ngasem, Kalitidu, Dander, dan Trucuk. Pemilihan wilayah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kelima kecamatan tersebut merupakan zona ekonomi produktif dengan jumlah UMKM sektor

kuliner terbanyak, serta memiliki dukungan infrastruktur telekomunikasi yang memadai untuk implementasi transaksi digital menggunakan QRIS

2. Variabel penelitian dibatasi pada penggunaan (QRIS), Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan sebagai variabel independen, Omzet UMKM sektor kuliner sebagai variabel dependen.
3. Pengukuran kinerja UMKM dan variabel lainnya dibatasi pada indikator yang digunakan dalam instrumen penelitian (kuesioner), sehingga hasil penelitian merefleksikan kondisi responden pada saat pengumpulan data.
4. Data yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada data primer yang diperoleh dari responden UMKM pada periode penelitian.